

Kajian Hadis tentang Keharusan Taat kepada Pemimpin

Lulus Rahayu¹, Nila Rohmatul Barokah², Khamim³

¹²³Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

¹lulusrahayuu@gmail.com, ²nilarohmatul24@gmail.com, ³khamim.musa@yahoo.com

Corresponding Author: Lulus Rahayu

Abstract: *This article examines the concept of obedience to a legitimate leader in Islam through the study of hadith. Obedience to leaders is an important aspect in maintaining security in a country. This article uses normative legal research methods, in this context the hadith of the Prophet Muhammad SAW is the main source of understanding the principles and obligations regarding obedience to leaders. This article provides a deeper understanding of obedience to legitimate leaders in the context of Islamic teachings. As a contribution to religious and social science literature, this article serves as a guide for Muslims to understand the roles and responsibilities that arise from obedience to their leaders and as discussion material to formulate new concepts in accordance with the demands of the times.*

Keywords: *Hadith; Obedience; Leader.*

Abstrak: Artikel ini mengkaji tentang konsep ketaatan kepada pemimpin yang sah dalam Islam melalui kajian hadis. Ketaatan kepada pemimpin merupakan aspek penting dalam menjaga keamanan dalam suatu negara. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dalam konteks ini hadis Nabi Muhammad SAW menjadi sumber utama pemahaman prinsip dan kewajiban mengenai ketaatan kepada pemimpin. Artikel ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang ketaatan kepada pemimpin yang sah dalam konteks ajaran Islam. Sebagai kontribusi terhadap literatur agama dan ilmu sosial, artikel ini berfungsi sebagai panduan bagi umat Islam untuk memahami peran dan tanggung jawab yang timbul dari ketaatan kepada pemimpin mereka dan sebagai bahan diskusi untuk merumuskan konsep-konsep baru sesuai dengan tuntutan zaman.

Kata Kunci: Hadis; Ketaatan; Pemimpin.

Pendahuluan

Kepemimpinan merupakan persoalan yang sangat mendesak yang perlu diteliti dan diselidiki, baik secara normatif maupun historis. Kepemimpinan sudah menjadi fitrah manusia dalam kehidupan, sebagaimana sudah menjadi hal yang lumrah dalam adanya tatanan sosial. Manusia mempunyai naluri alamiah untuk berorganisasi dan memerintah, sebaliknya sebagai makhluk sosial ingin hidup tenteram dan teratur. Kepemimpinan dalam konteks manajemen pendidikan Islam sering kali dikaitkan dengan konsep *khilafah*, *imamah*, atau *qawwamuna*. Meskipun konsep manajemen dan kepemimpinan Islam telah mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu, umat Islam tetap menganggap konsep yang diajarkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya sebagai yang terbaik dan sesuai, dengan tetap membuka diri terhadap sistem-sistem baru yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

Salah satu bukti tingginya posisi penguasa dalam hukum Islam adalah fakta bahwa Allah SWT menggabungkan perintah untuk taat kepada-Nya dan Rasul-Nya dengan ketaatan kepada penguasa, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat al-Quran, “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan *ulil amri* di antara kamu”. Jika ada ketidaksetujuan terhadap pemimpin, maka haruslah kembali kepada ajaran al-Quran dan *sunnah* Rasulullah SAW. Kepemimpinan diartikan sebagai proses memberikan arah yang bermakna bagi usaha bersama dan memobilisasi upaya yang bersedia dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.¹

Zaman telah berubah dan kepemimpinan pun harus beradaptasi. Era milenial menuntut gaya kepemimpinan yang berbeda dari generasi sebelumnya. Pemimpin milenial harus memahami dan merespon pola

¹ Sukatin, Heru Setiawan, and Mahsudi Hariyanto, “Hak Dan Kewajiban Pemimpin Dalam Bingkai Pendidikan Islam,” *Educational Journal of Islamic Manajemen* 1, no. 1 (2021): 32–34.

pikir serta gaya hidup generasi muda yang menggerakkan dunia kerja, kreativitas, inovasi, dan pasar global saat ini. Digitalisasi menuntut kepemimpinan yang tidak lagi konvensional. Pemimpin harus mampu berkomunikasi secara efektif dengan generasi milenial dan mendorong mereka untuk berinovasi, berkreasi, dan menjadi wirausahawan. Saluran untuk mengembangkan kreativitas, inovasi, dan jiwa kewirausahaan harus dirancang dengan baik dan praktis, bukan hanya teori belaka. Karakter pemimpin yang mampu mereduksi sikap negatif dan memaksimalkan potensi positif generasi milenial, seperti kecakapan teknologi, kecepatan, rasa haus akan ilmu pengetahuan, dan kemampuan berjejaring, sangat dibutuhkan.²

Menurut Sukatin dan kawan-kawan, kepemimpinan merupakan isu yang sangat penting untuk diteliti, baik dari segi normatif maupun historis. Kepemimpinan merupakan karakteristik alami manusia dalam menjalani kehidupan, karena menjadi hal yang utama dalam struktur sosial. Manusia secara alami memiliki dorongan untuk mengatur dan memimpin, namun sekaligus juga ingin hidup dalam keteraturan sosial. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia selalu terlibat dalam situasi kepemimpinan. Dalam konteks yang lebih luas, kepemimpinan selalu dianalisis dalam hubungannya dengan organisasi, baik dalam skala kecil maupun besar.³

Rifko Handayani, di dalam studinya menyebutkan, para pemimpin harus dapat membimbing manusia sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Seperti yang diungkapkan oleh Imam al-Mawardi bahwa salah satu tugas pemimpin adalah untuk meneruskan peran kenabian dalam menjaga agama dan memastikan kebaikan secara

² Ni Putu Depi Yulia Peramesti and Dedi Kusmana, "Kepemimpinan Ideal Pada Era Generasi Milenial," *TRANSFORMASI (Jurnal Manajemen Pemerintahan)* 10, no. 1 (2018): 83.

³ Sukatin, Setiawan, and Hariyanto, "Hak Dan Kewajiban Pemimpin Dalam Bingkai Pendidikan Islam," 32–34.

menyeluruh dalam segala aspek kehidupan. Jika pemimpin telah sepakat untuk membuat suatu aturan, maka rakyat wajib patuh asalkan pemimpin tersebut dipercayai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Allah SWT dan Rasul-Nya yang telah dijelaskan secara jelas.⁴

Lalu, menurut Sarkawi dan Ahmad Fadil, saat ini, dinamika dan evolusi sistem pemerintahan sedang menjadi topik hangat di kalangan para elit politik, bahkan dianggap sebagai keharusan yang harus dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Diperparah lagi dengan pertumbuhan media sosial yang cepat dan maju, memudahkan semua orang untuk mendapatkan informasi serta melihat kontroversi politik, terkadang menimbulkan kebingungan di antara masyarakat. Di satu sisi, masyarakat bisa percaya, tetapi di sisi lain mereka hanya dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan politik dari para elit.⁵

Sementara itu, Ahmad Khoirul Fata menyatakan, konsep kekuasaan dalam perspektif sosiologi Weberian diartikan sebagai kapasitas untuk mengendalikan atau mempengaruhi orang lain agar melakukan sesuatu maupun untuk mengatasi perlawanan dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam memengaruhi perilaku individu lainnya. Dalam tinjauan lebih rinci, gagasan kekuasaan dalam Weberian sangat berkaitan dengan otoritas dan pemaksaan.⁶

Di sisi yang lain, Syarifuddin Khardi dan kawan-kawan menyoroiti kepemimpinan adalah esensi dari manajemen. Jika dianalisis secara mendalam, maka gambaran tersebut menunjukkan bahwa manusia merupakan esensi dari kepemimpinan, setidaknya untuk masa kini.

⁴ Rifko Handayani, "Loyalitas Rakyat Terhadap Pemimpin Menurut Al-Mawardi Dan Hasan Al-Bana" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011). Baca juga, Fenolia Intan Saputri and Moch Choirul Rizal, "Studi Pemikiran Ketatanegaraan Imam Al-Mawardi," *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022): 17–34.

⁵ Sarkawi and Ahmad Fadil, "Memilih Pemimpin Dalam Islam," *Idarotuna: Jurnal Kajian Manajemen Dakwah* 3, no. 3 (2021).

⁶ Ahmad Khoirul Fata, "Kepemimpinan Dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam," *Jurnal Review Politik* 2, no. 1 (2012): 1–15.

Sumber daya manusia menjadi faktor penentu keberhasilan atau kegagalan kepemimpinan dalam suatu organisasi.⁷

Kemudian, menurut Inas Afifah Zahra dan kawan-kawan, seorang pemimpin adalah individu yang mampu memberikan inspirasi, memengaruhi pemikiran, emosi, dan tindakan orang lain, baik secara individu maupun dalam kelompok, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sementara itu, rakyat merujuk pada individu-individu yang tinggal di suatu wilayah negara dan memiliki kewajiban untuk taat serta menjaga keberlanjutan kekuasaan pemerintah. Dalam konteks Islam, pemimpin memiliki beberapa istilah seperti *imam*, *khalifah*, dan *amir*. Persyaratan untuk menjadi pemimpin termasuk di antaranya beragama Islam, adil, dapat dipercaya, memiliki kekuatan (baik secara fisik maupun spiritual), mencintai kebenaran, dan cerdas.⁸

Berdasarkan uraian-uraian di atas, artikel ini akan menjelaskan, pertama, apa saja yang dapat dilakukan untuk mentaati pemimpin. Kedua, menjelaskan kewajiban yang harus dilakukan pemimpin. Ketiga, menjelaskan kriteria pemimpin yang baik.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu berfokus pada studi dan analisis norma-norma hukum yang tertulis, seperti ayat dalam al-qur'an, hadis dan sunnah Nabi Muhammad SAW, serta kitab-kitab ulama. Peneliti juga mengumpulkan bahan hukum dari artikel hukum, buku hukum, dan publikasi hukum lainnya yang digunakan untuk dianalisis dengan

⁷ Syarifuddin Khardi, Ahmad Syukri, and Kasful Anwar, "Kesanggupan Pemimpin Membangun Ruh Al-Jama'ah Dalam Sistem Manajemen Pendidikan Islam," *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan* 5, no. 1 (2019).

⁸ Inas Afifah Zahra, Marno, and Basuki Wijaya, "Kewajiban Pemimpin Dan Rakyat Dalam Perspektif Al-Qur'an Surah an-Nisa Ayat 58-59," *JIES (Journal of Islamic Education Studies)* 1, no. 1 (2022): 9-16.

tujuan memahami makna, hubungan, dan konsistensi antarnorma hukum.

Ketaatan kepada Pemimpin

Dalam hukum ketatanegaraan Islam, pemimpin negara sering disebut dengan gelar *imamah* dan *khalifah*, yang keduanya melambangkan arti kepemimpinan utama dalam negara Muslim. Frasa “*imamah*” cenderung lebih umum diucapkan di kalangan *Syi'ah*, sementara “*khalifah*” lebih sering digunakan dalam komunitas *Sunni*.⁹ Selain itu, istilah “*imam*” sering dikaitkan dengan peran sebagai *imam* dalam salat, sehingga dalam literatur Islam, dibuat perbedaan antara *imam* yang bertugas sebagai kepala negara dan *imam* yang memimpin salat. Pada umumnya, yang pertama disebut sebagai “*al-Imamah al-Kubra*”, sementara yang kedua disebut “*al-Imamah Shugra*”.¹⁰

Terdapat hadis tentang pemimpin yang artinya adalah sebagai berikut:

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: ‘Barangsiapa yang mentaati aku, maka dia telah mentaati Allah SWT. Dan barangsiapa yang mendurhakai aku, maka dia telah mendurhakai Allah SWT. Dan barangsiapa yang mentaati pemimpinku, maka dia telah mentaati aku. Dan barangsiapa yang mendurhakai pemimpinku, maka dia telah mendurhakai aku’.”

Sanad hadis tersebut: (1) Rasulullah SAW; (2) Abu Hurairah; (3) Salamah ibnu Rahman; (4) Az-zuhri; (5) Yunus; (6) Abdullah; kemudian (7) Abdan. Hadis tersebut telah diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam *shahih*-nya. Hadis ini menyampaikan pesan seputar kewajiban

⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 129.

¹⁰ A Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2007), 56.

taat terhadap pemimpin atau penguasa dalam Islam. Jadi, keseluruhan makna hadis tersebut adalah:

“Barangsiapa yang mentaati saya, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sesungguhnya ia telah bermaksiat kepada Allah. Dan barang siapa yang mentaati pemimpin saya, maka sesungguhnya ia telah mentaati saya, dan barang siapa yang bermaksiat kepada pemimpin saya, maka sesungguhnya ia telah bermaksiat kepada saya.”

Islam mengajarkan bahwa ketaatan masyarakat kepada pemimpinnya berbanding lurus dengan ketaatannya kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Rakyat memenuhi kewajibannya terhadap pemimpinnya dengan ketaatan dan pemimpin memenuhi kewajibannya terhadap rakyatnya dengan memenuhi misi dan keadilannya dalam segala hal. Pemimpin harus memiliki kapasitas untuk mengarahkan manusia kembali kepada ajaran yang disampaikan oleh Rasul SAW. Menurut al-Mawardi, salah satu tanggung jawab pemimpin adalah untuk mengemban peran kenabian dalam memelihara agama dalam semua aspek kehidupan guna mencapai kesejahteraan secara menyeluruh.

Apabila pemimpin telah menyepakati suatu keputusan, maka rakyat wajib mematuhi, dengan syarat bahwa pemimpin tersebut dapat dipercaya dan tidak bertentangan dengan ketentuan Allah SWT dan Rasul-Nya yang disampaikan secara tegas. Mereka yang terlibat dalam perumusan kebijakan dan kesepakatan merupakan orang-orang yang dipilih secara hati-hati dalam mengatasi suatu permasalahan. Kesetiaan merupakan salah satu fondasi utama dalam sistem pemerintahan Islam yang menjadi landasan sistem politiknya. Tidak mungkin bagi sebuah sistem memiliki keberhasilan, negara yang stabil dan damai tanpa adanya pemimpin yang adil dan tanpa kesetiaan rakyat terhadap penguasanya.¹¹

¹¹ Zahra, Marno, and Wijaya, “Kewajiban Pemimpin Dan Rakyat Dalam Perspektif Al-Qur’an Surah an-Nisa Ayat 58-59.”

Umar bin Khattab menjelaskan pentingnya ketaatan dalam agama ini dengan mengatakan, “tidak ada makna Islam tanpa jamaah, tidak ada arti jamaah tanpa amir, dan tidak ada arti amir tanpa ketaatan”. Karena Islam bukanlah agama perseorangan, melainkan agama komunal, dan Islam hanya dapat diwujudkan secara utuh dengan adanya suatu komunitas. Dari sini kita memahami mengapa orang-orang yang menyuruh atau melarang agama sering kali mengajak orang untuk berbicara secara berkelompok atau berjamaah, bukan sebagai perseorangan. Jamaah tidak ada artinya jika hidup mandiri, tidak mempunyai hubungan yang sistematis, dan tidak diperkenankan dipersatukan oleh *amir* untuk mengurus urusannya. Sekalipun sang *amir* mempunyai sifat-sifat yang luhur dan prestasi yang baik, kepandaian yang tinggi, akal yang hebat dan akal yang kuat, semua itu tidak ada artinya bagi jamaah, kecuali jamaah menunjukkan kesetiaan, tidak menentang untuk mengikuti aturan-aturan-Nya, dan menjauhi larangan-Nya. Pasalnya, unsur pembangunan bangsa yang pertama adalah pemerintahan atau kepemimpinan. Kedua, rakyatnya. Di dalam hal prioritas dan preferensi, rakyat adalah faktor pertama yang dapat diutamakan oleh mereka yang berkuasa.¹²

Pemimpin harus mempunyai keterampilan dan kemampuan untuk menyelenggarakan dan mengelola pemerintahan yang baik, serta dapat dimintai pertanggungjawaban secara moral dan yang lebih penting lagi dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Proses hak pilih universal di negara demokrasi merupakan suatu hal yang baik, karena memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk menyampaikan pendapatnya dan juga memberikan hak untuk berpartisipasi dalam menentukan arah perbaikan negara. Memilih pemimpin merupakan tanggung jawab setiap individu kepada Allah SWT, sehingga hak memilih

¹² Handayani, “Loyalitas Rakyat Terhadap Pemimpin Menurut Al-Mawardi Dan Hasan Al-Bana,” 15–18.

merupakan suatu perbuatan yang mempertanggungjawabkan seseorang kepada Allah SWT.

Ketaatan kepada pemimpin dapat dilakukan melalui, pertama¹³, percaya dan berprasangka baik. Terdapat istilah “*tsiqah*” yang artinya beriman, yaitu meyakini apa saja yang diperintahkan *amir* (pemimpin) demi tercapainya urusan bersama. Maka rakyat harus memilih orang yang benar-benar jujur dan dapat dipercaya. Kepercayaan hanya akan hilang jika terjadi pengkhianatan. Contohnya adalah ketika pemimpin mengubah urusan bersama yang mengikat mereka, mengasingkan, dan mengingkari keberhasilannya atau menghalanginya.

Kedua, memberikan nasihat kepada pemimpin Tamim ad-Dari menuturkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, yang artinya adalah sebagai berikut:

“‘Agama itu nasihat/kesetiaan.’ Kami bertanya ‘Bagi siapa, wahai Rasulullah’. Beliau bersabda. ‘Bagi Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, para imam kaum muslim dan bagi mereka pada umumnya’.”

Nasihat harus diberikan secara rahasia. Jabir bin Nufayr mengatakan bahwa 'Iyadh bin Ghanam pernah memukul seorang warga hingga ia terluka. Kemudian Hisyam bin Hakim menyalahkannya secara lisan hingga 'Iyadh menjadi marah. Setelah beberapa malam dan mengemukakan alasannya seraya berkata tentang sabda Rasulullah SAW, yang artinya adalah sebagai berikut:

“Sesungguhnya orang yang paling keras menerima siksaan pada hari kiamat adalah orang yang paling keras menyiksa manusia di dunia. 'Iyadh berkata, ‘Sungguh, aku juga telah mendengar apa yang engkau dengar dan berpandangan seperti pandanganmu, masalahnya, apakah engkau tidak mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Siapa saja yang ingin menasihati orang yang memiliki kekuasaan secara umum maka janganlah menyampaikan nasihat kepadanya secara terang-terangan, tetapi hendaklah secara menyendiri.

¹³ Sarkawi and Fadil, “Memilih Pemimpin Dalam Islam.”

Apakah engkau tidak khawatir jika penguasa Allah akan membunuhmu sehingga engkau dibunuh oleh penguasa Allah' (HR al-Baihaqi, Ibn al-Atsir, dan ath-Thabrani)."

Ketiga, mengerjakan perintahnya selama tidak bermaksiat kepada Allah SWT sebagaimana firman-Nya:

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, serta *ulil amri* di antara kamu. Jika terjadi perbedaan pendapat di antara kamu, maka kembalikanlah masalah tersebut kepada Allah (al-Quran) dan Rasul-Nya (*sunnah*-nya), hal ini dilakukan bila kalian sungguh-sungguh beriman kepada Allah SWT dan hari kiamat. Hal tersebut lebih baik dan lebih utama bagi kalian (Q.S. an-Nisa': 59)."

Namun, ketaatan kepada pemimpin tidak berlaku dalam hal pemberontakan yang jelas-jelas sesat dan tidak diragukan lagi sebagai tindakan pemberontakan. Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya adalah sebagai berikut:¹⁴

"Wajib mendengarkan dan tunduk kepada setiap muslim dalam hal yang disetujuinya dan yang ia tidak sukai, kecuali jika ia diperintahkan untuk berbuat maksiat. Jika diperintahkan untuk berbuat maksiat, maka ia tidak wajib mendengarkan dan taat (HR Al-Bukhari dan Muslim).

Kewajiban sebagai Pemimpin

Maksud utama dari syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan bersama. *Mashlahah* merujuk pada kebaikan yang terkait dengan kelangsungan hidup manusia, kesempurnaan kehidupan, dan pemenuhan kebutuhan intelektual dan emosional secara keseluruhan. Para *fugaha* atau ahli fikih membagi kepentingan dan kemaslahatan publik menjadi 3 (tiga) kategori. Pertama, kemaslahatan yang mencakup kebutuhan esensial seperti perlindungan terhadap jiwa, harta, kesehatan fisik, dan mental. Kedua, kemaslahatan yang termasuk

¹⁴ Sukatin, Setiawan, and Hariyanto, "Hak Dan Kewajiban Pemimpin Dalam Bingkai Pendidikan Islam," 37–39.

kepentingan yang diperlukan secara umum untuk kesejahteraan sosial dan kemudahan hidup masyarakat seperti aturan tentang infrastruktur publik, seperti jalan dan taman kota. Ketiga, kemaslahatan untuk tujuan tertentu seperti penekanan pada moral dan budaya Islami.

Di dalam konteks kepemimpinan, prinsip hukum Islam menyatakan bahwa keputusan seorang pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan rakyatnya. Setiap keputusan pemimpin yang memengaruhi kepentingan publik harus diambil berdasarkan prinsip kemaslahatan. Memelihara kemaslahatan publik bukanlah kewajiban semata-mata pemimpin dan pemerintah, tetapi seluruh umat Islam memiliki tanggung jawab untuk melakukannya. Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa umat Islam mengutamakan hak dan kepentingan komunitas di atas kepentingan individu serta menekankan kesetiaan kepada masyarakat di atas kesetiaan kepada suku atau individu.

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa kepemimpinan memiliki 2 (dua) tujuan utama. Pertama, untuk mewujudkan kemaslahatan dalam bidang spiritual dan sosial ekonomi. Kedua, untuk mendorong kebaikan dan mencegah keburukan. Kebaikan adalah segala sesuatu yang mencakup kemaslahatan dan keadilan, baik yang diatur oleh syariat maupun akal.¹⁵

Dalam menjadi pemimpin *ruh al-jama'ah* (membangkitkan semangat rakyat) diharuskan memiliki beberapa sifat. Pertama, menjadi pemimpin yang taat. Ketaatan pemimpin mempengaruhi jiwa pemimpin dan semangat pemimpin, sehingga hati nurani selalu berada pada jalan yang benar dan dapat mengembalikan hati nurani pada jalan kebenaran. Pemimpin mempunyai kewajiban untuk memberikan contoh kepada bawahannya agar dapat melaksanakan segala jenis tugas dengan benar.

¹⁵ Lihat, Fata, "Kepemimpinan Dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam."

Kedua, dapat mengalokasikan sumber daya manusia sesuai kompetensi atau kemampuannya. Hal ini dilakukan agar tujuan yang ingin dicapai dapat dipercayakan kepada orang-orang yang berkompeten di bidang tersebut. Sumber daya manusia adalah satu-satunya sumber daya yang mempunyai akal, emosi, keinginan, keterampilan, pengetahuan, kemauan, dan kekuasaan.

Ketiga, menjaga komitmen dan mengutamakan musyawarah. Pemimpin yang bijaksana dan dapat menjaga komitmen yang erat kaitannya dengan hubungan dengan kehidupan bermasyarakat, hubungan dengan manusia, dan juga hubungan vertikal dengan sang pencipta. Hubungan seperti ini memberi kesan bahwa para pemimpin harus selalu ingat bahwa setiap langkah yang mereka ambil selalu diawasi. Oleh karena itu, harus berhati-hati dalam mengambil tindakan dan keputusan, baik yang bersifat sementara maupun permanen, karena itu pengambilan keputusan pemimpin dapat dimusyawarahkan terlebih dahulu.¹⁶

Kriteria Pemimpin yang Baik

Menurut al-Qur'an, pertama, beriman. Kriteria beriman dipahami dari Q.S. al-Anbiyā' (21): 73 yang menggunakan terma "*al-immah*" serta Q.S. Fātir (35): 39 dan QS. al-Hadīd (57): 7 yang menggunakan derivasi terma "*khalifah*" "خليفة". Khusus terma "*al-immah*" sebagaimana yang telah disinggung asal kata aslinya adalah "*al-imām*". Menurut Tabatabai, seorang pemimpin harus beriman dan mendapat hidayah dalam menjadi pemimpin, yang merupakan bagian dari kepemimpinan itu sendiri, dan hidayah tidak bisa diminta oleh siapapun dan dengan cara apa pun. Perolehan kepemimpinan itu dicapai melalui kesabaran hamba dalam

¹⁶ Khardi, Syukri, and Anwar, "Kesanggupan Pemimpin Membangun Ruh Al-Jama'ah Dalam Sistem Manajemen Pendidikan Islam," 81–83.

menghadapi berbagai cobaan di hadapan Allah SWT dan melalui keimanannya yang mendalam.

Kedua, adil dan amanah (dapat dipercaya), seperti di dalam Q.S. Shad (38): 26. Ayat ini menggambarkan posisi kekhalifahan yang diusung oleh Nabi Dawud AS. Saat itu, beliau diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengambil keputusan secara adil di tengah masyarakat. Terkait amanah disebutkan, misalnya, di dalam Q.S. an-Nisaa (4): 58. Dalam pandangan Almaraghi, amanah merupakan tanggung jawab yang dibagi menjadi 3 (tiga) bidang: (1) tanggung jawab manusia terhadap Tuhan, (2) tanggung jawab manusia terhadap sesamanya; dan (3) tanggung jawab manusia terhadap dirinya sendiri.

Ketiga, *rasuliy*, yang artinya mempunyai kepribadian seperti Rasulullah SAW. Dengan kata lain, pemimpin harus mengacu kepada standar yang dimiliki Rasulullah SAW dalam menjalankan kepemimpinan. Kriteria yang ketiga ini dapat dijumpai di dalam Q.S. al-Baqarah (2): 124 dan Q.S. an-Nisaa (4): 59 dan 83.

Selain kriteria kepemimpinan yang telah diuraikan di atas, masih ada beberapa kriteria kepemimpinan yang lain.¹⁷ Pertama, berakhlak mulia. Karakteristik pemimpin yang baik dalam Islam melibatkan memiliki akhlak yang mulia, seperti jujur, adil, tabah, tekun, dan konsisten dalam tugasnya. Selain itu, seorang pemimpin harus dapat menahan diri dari godaan dunia dan memelihara martabatnya sebagai pemimpin.

Kedua, kepemimpinan berdasarkan al-Quran dan *as-Sunnah*. Sebuah standar bagi pemimpin yang baik dalam Islam adalah yang berpegang teguh pada al-Quran dan *as-Sunnah*. Seorang pemimpin seharusnya dapat mengambil hikmah dari ayat al-Quran dan hadis Nabi

¹⁷ Istina Rakhmawati, "Karakteristik Kepemimpinan Dalam Perspektif Manajemen Dakwah," *TADBIR: Jurnal Manajemen Dakwan* 1, no. 2 (2016): 171–188.

Muhammad SAW serta menerapkannya dalam kepemimpinannya. Kemampuan untuk menjadi teladan dan memberikan contoh kepada masyarakat juga merupakan hal penting.

Ketiga, kepemimpinan inklusif. Sebagai pemimpin, inklusivitas diperlukan, yang berarti mempertimbangkan kepentingan semua segmen masyarakat tanpa terkecuali. Pemimpin harus mampu menjalin hubungan yang baik dengan berbagai lapisan masyarakat dan membangun suasana harmonis di antara kelompok.

Keempat, kepemimpinan yang berorientasi pada kemaslahatan. Seorang pemimpin yang baik dalam Islam harus berfokus pada kemaslahatan. Prioritas utama seorang pemimpin adalah kepentingan masyarakat. Pemimpin harus mampu membuat keputusan yang bermanfaat bagi masyarakat dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencapai manfaat tersebut.

Kelima, amanah. Kepercayaan adalah kunci keberhasilan dalam pekerjaan apapun. Kepercayaan sangat penting bagi para pemimpin yang bertugas memimpin organisasi yang beroperasi di bawah manajemen yang baik dan memberikan hasil yang diharapkan.

Keenam, memiliki ilmu dan keahlian. Seorang pemimpin yang baik harus menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan bidang keahliannya, memahami dan mengelola spesifikasi bidang kerjanya, serta keahliannya dalam menyusun pekerjaannya. Sebab tanpa pengetahuan dan keahlian yang memadai, niscaya organisasi dan kepemimpinan akan hancur dan tidak berfungsi lagi.

Ketujuh, benar, adil, dan dapat dipercaya. Pemimpin yang jujur dan adil merupakan pemimpin idaman bagi rakyat. Sebab pemimpin yang demikian selalu mendapat bayang-bayang rahmat dari Allah SWT. Karena Allah SWT selalu memerintahkan kita untuk bertindak adil, baik hati, dan jujur.

Penutup

Dalam mengeksplorasi ketaatan kepada pemimpin yang sah melalui kajian hadis, kita dapat menyimpulkan bahwa fondasi kepatuhan terletak pada nilai-nilai moral dan etika Islam. Hadis-hadis yang menggarisbawahi keharusan taat kepada pemimpin menyoroti pentingnya memelihara ketertiban sosial dan stabilitas masyarakat. Dengan merujuk pada ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW, kita diajak untuk menghargai dan mendukung kepemimpinan yang sah, sekaligus menjauhi fitnah dan perpecahan. Ketaatan kepada pemimpin bukanlah sekadar kewajiban hukum semata, tetapi juga ekspresi dari rasa tanggung jawab moral dan sosial terhadap masyarakat. Dalam konteks ini, kajian hadis mengajarkan bahwa taat kepada pemimpin tidak hanya berarti patuh terhadap perintahnya, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan.

Referensi

- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Fata, Ahmad Khoirul. "Kepemimpinan Dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam." *Jurnal Review Politik* 2, no. 1 (2012): 1–15.
- Handayani, Rifko. "Loyalitas Rakyat Terhadap Pemimpin Menurut Al-Mawardi Dan Hasan Al-Bana." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Khardi, Syarifuddin, Ahmad Syukri, and Kasful Anwar. "Kesanggupan Pemimpin Membangun Ruh Al-Jama'ah Dalam Sistem Manajemen Pendidikan Islam." *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan* 5, no. 1 (2019).

- Peramesti, Ni Putu Depi Yulia, and Dedi Kusmana. "Kepemimpinan Ideal Pada Era Generasi Milenial." *TRANSFORMASI (Jurnal Manajemen Pemerintahan)* 10, no. 1 (2018): 73–84.
- Rakhmawati, Istina. "Karakteristik Kepemimpinan Dalam Perspektif Manajemen Dakwah." *TADBIR: Jurnal Manajemen Dakwan* 1, no. 2 (2016): 171–188.
- Saputri, Fenolia Intan, and Moch Choirul Rizal. "Studi Pemikiran Ketatanegaraan Imam Al-Mawardi." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022): 17–34.
- Sarkawi, and Ahmad Fadil. "Memilih Pemimpin Dalam Islam." *Idarotuna: Jurnal Kajian Manajemen Dakwah* 3, no. 3 (2021).
- Sukatin, Heru Setiawan, and Mahsudi Hariyanto. "Hak Dan Kewajiban Pemimpin Dalam Bingkai Pendidikan Islam." *Educational Journal of Islamic Manajemen* 1, no. 1 (2021).
- Zahra, Inas Afifah, Marno, and Basuki Wijaya. "Kewajiban Pemimpin Dan Rakyat Dalam Perspektif Al-Qur'an Surah an-Nisa Ayat 58-59." *JIES (Journal of Islamic Education Studies)* 1, no. 1 (2022): 9–16.